



KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR  
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADEMAWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ;
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Surat Menteri Desa Pembangunan
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang perubahan PMK RI Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2022.
16. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
17. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pemulihan ekonomi di Propensi Jawa Timur.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
20. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor: 124 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tehknis Operasional Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur.
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 17) ;

22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengalokasian, Pembagian, dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa.
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2022.
27. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
28. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/511/432.013/2022 Tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022.
29. Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 736/238/432.312/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang petunjuk teknis pendataan dan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
30. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa Tahun 2019/2025.
31. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RKPDesa Tahun 2022.
32. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2022.
33. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
34. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021.
35. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
36. Berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 412.2/207/112.3/2022 Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022,
37. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADEMAWU TIMUR  
Dan  
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademawu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.175.639.410,84
2. Belanja Desa	Rp	2.189.197.921,86
Surplus/Defisit	Rp	-85.558.511,02
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	85,558,511.02
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	72,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	13,558,511.02
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. RAPB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pademawu Timur.

Ditetapkan di : Pademawu Timur  
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

Kepala Desa Pademawu Timur,

JUMA'ATI ELI SSUSANTI

Diundangkan di : Pademawu Timur  
Pada tanggal : 28 Oktober 2022  
Sekretaris Desa Pademawu Timur

AKH. SA'ID

LEMBARAN DESA PADEMAWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2022